

**TRUSTWORTHY GOVERNMENT MELALUI PENERAPAN SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN
BANTAENG**

Andi Izzulhaq
NPP. 32.0878

Asal Pendaftaran Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: andiizzulhaq88@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Andi Pitono, S.Sos., M.Si.

ABSTRACT

Background: This research is motivated by the low level of public trust in the government, as reflected in the suboptimal scores of the Electronic-Based Government System (SPBE) Index and the Public Service Quality Perception Index (IPKP) of Bantaeng Regency. Additionally, issues in the archival sector, such as technological limitations, a lack of archival human resources, and non-standardized archive management, pose challenges in optimizing public services. **Purpose:** This study aims to examine the implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) in realizing trustworthy governance in Bantaeng Regency. **Methods:** This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The analysis is based on the elements of trustworthy government (Carnevale), such as leadership, participation and involvement, effective communication, performance appraisal and incentive system, and managing power, politics, and conflict. **Conclusion:** The results show that the implementation of SRIKANDI has contributed positively to enhancing the transparency, efficiency, and accountability of public services, especially when supported by strong leadership commitment and synergy among regional apparatus organizations. However, challenges remain regarding digital infrastructure and human resource competency.

Keywords: Trustworthy Government, SRIKANDI, Digital Archives, Public Service, Bantaeng Regency

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang tercermin dari capaian Indeks SPBE dan IPKP Kabupaten Bantaeng yang masih belum optimal. Selain itu, permasalahan dalam bidang kearsipan, seperti keterbatasan teknologi, minimnya SDM arsiparis, dan belum standarnya pengelolaan arsip, menjadi tantangan dalam optimalisasi pelayanan publik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpercaya (*trustworthy government*) di Kabupaten Bantaeng. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pendekatan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil:** Analisis berdasarkan elemen *trustworthy government* (Carnevale) seperti *leadership, participation and involvement, effective communication, performance appraisal and incentive system, serta managing power, politics, and conflict* menunjukkan bahwa penerapan SRIKANDI mampu meningkatkan profesionalisme birokrasi dan kepercayaan publik, terutama ketika didukung oleh komitmen pimpinan daerah dan sinergi antar perangkat daerah. **Kesimpulan:** menunjukkan bahwa penerapan SRIKANDI di Kabupaten Bantaeng memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik, meskipun masih menghadapi hambatan dalam hal infrastruktur digital dan kompetensi SDM.

Kata Kunci: *Trustworthy Government*, SRIKANDI, Arsip Digital, Pelayanan Publik, Kabupaten Bantaeng

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang dapat dipercaya atau kredibel memperlihatkan adanya peningkatan dalam pemantapan sistem administrasi pemerintahan yang semakin transparan, efisien, dan dapat diandalkan. Untuk menciptakan hal tersebut, kehidupan bermasyarakat harus dapat didukung dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan dapat dipercaya. Menciptakan pemerintahan yang dapat dipercaya di tengah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi tantangan penting bagi para aparatur sipil negara, mulai dari pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat. Dengan menyadari kondisi tersebut, berkembanglah pola pikir baru yang menuntut pelaksanaan pemerintahan untuk melaksanakan pembaruan birokrasi (Wasistiono, S, 2022).

Mengacu pada semangat reformasi Indonesia tahun 1998, penyelenggaraan pemerintahan di masa otonomi daerah dituntut untuk dilaksanakan demi menjamin terpenuhinya pelayanan publik. Catatan buruk dalam tata kelola pemerintahan era Orde Baru antara lain menyangkut rendahnya keterbukaan, banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih, proses birokrasi yang panjang, dan banyaknya perilaku

aparatus yang terlibat dalam praktik KKN (Sukoco, 2023). Dampak dari kondisi tersebut meliputi terhambatnya pelaksanaan pemerintahan, terganggunya layanan publik, melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, serta menurunnya capaian pembangunan ekonomi dan sosial (Tulungen, 2022) .

Perwujudan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dapat dipercaya demi mendorong kesejahteraan masyarakat tercermin melalui pelayanan publik. Secara garis besar, pelayanan publik adalah cara pemerintah memenuhi kebutuhan publik. Hal ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara, yang mencakup layanan di bidang barang, jasa, dan administrasi. Ini adalah alasan pemerintah daerah terus menerapkan sistem digital secara berkesinambungan.

Penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik merupakan perwujudan dari tujuan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keunggulan dari sistem ini terlihat nyata dalam pelayanan publik, di mana masyarakat dapat memperoleh layanan dari Aparatur Sipil Negara tanpa perlu melakukan tatap muka secara langsung. Cukup dengan memanfaatkan perangkat digital yang terhubung ke jaringan internet dan mengakses situs web yang disediakan oleh OPD sebagai penyelenggara layanan, segala permintaan masyarakat dapat direspons dengan tepat waktu, secara optimal, serta efisien dalam penggunaan sumber daya. Perhatian selanjutnya terletak pada upaya pemerintah daerah, khususnya OPD yang menyelenggarakan layanan publik, dalam menyosialisasikan sistem ini secara maksimal. Kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi digital (Umi Nadia Jalaludin, 2025).

Teknologi informasi digital adalah suatu sistem guna mendukung implementasi pemerintah dalam mewujudkan *trustworthy government* untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga teknologi informasi digital bisa mencegah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peningkatan keterbukaan dan tanggung jawab organisasi pemerintahan.

Realita penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi digital ditandai pada pelayanan publik yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan bentuk pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, keberadaan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi suatu kebutuhan. Digitalisasi arsip, pembangunan platform informasi, dan penerapan kecerdasan buatan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi manajemen arsip.

Peningkatan ini tidak hanya mempercepat akses dan berbagi informasi, tetapi juga mendorong pemanfaatan arsip yang lebih efektif. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan kebijakan yang mendukung transformasi digital. Dengan pendekatan yang tepat, universitas dapat membangun sistem manajemen arsip yang modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman (Dimas Saputra, 2024)

Realisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantaeng tertuang dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menunjukkan data-data tentang kondisi realita pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng. Adapun capaian Indeks SPBE Kabupaten Bantaeng pada tahun 2023 mencapai 3,04 dengan status kategori “Baik”. Capaian Indeks SPBE ini dinilai masih belum optimal disebabkan karena penerapan arsitektur SPBE belum dilaksanakan secara maksimal.

Kemudian adapun capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Bantaeng tahun 2023 sebesar 81,29. Capaian ini merupakan upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng. Namun capaian tersebut, dinilai masih perlu diperbaiki dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, efisien dan berkualitas, khususnya dalam pelayanan dasar masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, transformasi pelayanan publik sudah menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan melalui berbagai inovasi dan juga improvisasi dalam memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik berkualitas.

Fenomena lain yang perlu menjadi perhatian di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2023 dalam sektor pelayanan publik adalah reformasi birokrasi. Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi, masih terdapat banyak tantangan yang terlihat dari banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 menampilkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Bantaeng belum berjalan secara optimal, sehingga masih dikategorikan pada peringkat 'B' dengan perolehan nilai sebesar 63,28 poin. Capaian ini mengindikasikan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Bantaeng sudah baik pada level pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Selanjutnya salah satu layanan publik dalam urusan pemerintahan wajib non-dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bidang kearsipan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Bantaeng, bidang kearsipan di Kabupaten Bantaeng memiliki permasalahan diantaranya keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan sistem perlindungan serta pemeliharaan arsip daerah, disertai dengan minimnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara standar, serta kurangnya tenaga arsiparis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat salah satu asas pemerintahan yang disebut dengan

tugas pembantuan dengan cirinya berupa pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional, kewenangan yang melekat pada pemberi tugas, disediakan dana, sarana dan prasarana serta personil yang diperlukan (Pitono, 2012)

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Tim Koordinasi Nasional Srikandi yang terdiri atas Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berinovasi dengan membuat aplikasi umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Aplikasi SRIKANDI dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat-menyurat dan arsip, serta diharapkan mampu meningkatkan mutu dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip. Selain itu, aplikasi ini diharapkan untuk menjadi catatan digital kolektif negara dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Implementasi aplikasi Srikandi diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD), serta dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Tekad kepala daerah yang diwujudkan melalui kehendak politik (*political will*) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat dilakukan oleh Pejabat Bupati Bantaeng melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pada seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya komitmen bersama maka akan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah sekaligus pembangunan daerah. Bagi Pejabat Bupati Bantaeng Andi Abubakar selaku kepala daerah yang juga merupakan birokrat eselon II Arsip Nasional Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Biro Manajemen Kinerja, Keuangan, dan Organisasi hal ini dapat menjadi bagian dari *political will* dalam optimalisasi layanan publik melalui melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kabupaten Bantaeng.

Dari fakta yang ada terkait masalah kearsipan dan bagaimana masalah ini berhubungan dengan sektor pelayanan publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan pemerintahan yang terpercaya memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian, belum terwujudnya reformasi birokrasi yang terlihat dari berbagai permasalahan pada kondisi birokrasi yang timbul juga merupakan dampak dari kurang kuatnya tata kelola pemerintahan. Hal ini merupakan fenomena yang dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang harus diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng serta bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantaeng mulai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Kantor Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, dan seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pengenalan dan pembatasan masalah yang telah

dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Sehingga penulis ingin mengajukan judul penelitian yaitu “*Trustworthy Government* Dalam Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Bantaeng”.

1.2. Kesenjangan Masalah

Kesenjangan masalah terletak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah berkaitan pada proses penyelenggaraan pemerintahan dibuktikan dengan capaian indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng Tahun 2023, Indeks SPBE 2023, dan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2023 yang masih belum optimal. Kemudian dalam RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 tertuang bahwa adapun permasalahan dalam bidang kearsipan diantaranya diantaranya keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan sistem perlindungan serta pemeliharaan arsip daerah, disertai dengan minimnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara standar, serta kurangnya tenaga arsiparis.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan dengan melihat penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. penelitian mengenai pemerintahan yang terpercaya (*trustworthy government*) telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Dengan teori serta hasil yang berbeda, dari kelima penelitian tersebut 4 diantaranya memiliki persamaan dalam penggunaan metode kualitatif. Pendekatan eksploratif hingga tinjauan literatur digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan teknik pengumpulan didominasi dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian sebelumnya inilah yang akan menjadi dasar dan acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Penelitian pertama oleh (Kalesaran 1992), terfokus pada implementasi sistem merit menuju pemerintahan yang terpercaya dengan studi kasus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Penelitian kedua oleh (Dewi Marta, F. 2017), membahas mengenai implementasi *e-government* dalam menuju pemerintahan yang terpercaya dengan mengkaji aplikasi e-kelurahan di Kota Bandung
3. Penelitian ketiga oleh Polii, A. M. (2021), mengkaji bagaimana membangun suatu kredibilitas pemerintah melalui digitalisasi yang terfokus pada pengembangan *Command Centre* di Sulawesi Utara.
4. Penelitian keempat oleh (Sirajuddin & Atrianingsi. 2020), menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan jaminan kesehatan berbasis *e-government* dengan fokus pada aplikasi *e-mobile* BPJS Kesehatan di Kota Makassar.
5. Penelitian kelima oleh (Aini, Y.N. 2023) membahas terkait bagaimana tatakelola arsip melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dengan menggunakan teori inovasi dari Rogers di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang diatas adalah bahwa penelitian ini berfokus pada mengkaji tata kelola pemerintahan yang terpercaya dalam penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI). Lokus dalam penelitian ini yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantaeng yang merupakan dinas yang berperan dalam manajemen kearsipan di Kabupaten Bantaeng.

1.5. Tujuan

Untuk mengetahui penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) untuk optimalisasi pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang terpercaya (*Trustworthy Government*) di Kabupaten Bantaeng.

II. METODE

Untuk membahas pemerintahan yang terpercaya di Kabupaten Bantaeng dalam penerapan arsip digital, metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian kali ini. Penelitian deskriptif yaitu metode yang dalam penelitian ini berusaha memaparkan permasalahan atau fenomena yang terjadi secara apa adanya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penilaian/analisis terhadap fenomena tersebut. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, penulis dapat mengeksplorasi permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh. Seperti halnya menurut (Sugiyono, 2019) yang mengemukakan, “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Dengan menggunakan penelitian deskriptif, penelitian ini dapat menggambarkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bantaeng yang terpercaya dalam penerapan arsip digital. Selanjutnya menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), sedangkan alat-alat audiovisual disebut sebagai alat bantu pengumpulan data (Syahza & Riau, 2011). Data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Sugiyono menjelaskan pula bahwa dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif (participant observation), dan studi dokumen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga teknik

pengumpulan data yang telah dikemukakan oleh Sugiyono tersebut. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh (Huberman, 1992) yang meliputi pengurangan data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (verification). Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2024/2025 yang bertempat di Kabupaten Bantaeng dengan mengambil fokus lokasi penelitian di Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Trustworthy Government dalam Penerapan SRIKANDI untuk Optimalisasi Layanan Publik Dianalisis dari Dimensi Leadership

Pada dimensi *leadership* yang pertama yaitu tanggungjawab dari Pemerintah. Kemampuan tanggung jawab adalah kemampuan untuk menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, terdapat tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang kemudian dibebankan kepada semua OPD dan UPT Teknis dalam penerapan aplikasi SRIKANDI ini.

Berdasarkan temuan di lapangan, permasalahan dalam penerapan aplikasi SRIKANDI adalah belum optimalnya penerapan keseluruhan OPD pada tahun 2023 tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan dengan baik dalam penerapan SRIKANDI mengarah pada efektifitas dan efisiensi dalam administrasi birokrasi. Dampak dari penerapan ini juga cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan diantaranya indeks SPBE Kabupaten Bantaeng meningkat dan predikat Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan Juga meningkat. Dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), terdapat beberapa komponen penting dalam pengelolaan arsip dinamis, yaitu naskah masuk, naskah keluar, disposisi, dan berkas.

Naskah masuk dan keluar merupakan komponen penting dalam penerapan SRIKANDI. Naskah masuk merujuk pada dokumen atau surat yang diterima oleh suatu instansi dari pihak internal maupun eksternal. Melalui aplikasi SRIKANDI, naskah masuk diregistrasi dan dicatat secara elektronik, lalu diteruskan secara digital kepada pejabat atau unit kerja yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Proses ini menggantikan sistem manual sehingga lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, naskah keluar merupakan dokumen atau surat yang dibuat oleh instansi untuk dikirim kepada pihak lain. Di dalam SRIKANDI, proses pembuatan naskah keluar dilakukan secara digital, mulai dari penyusunan, pengeditan, hingga penandatanganan elektronik oleh pejabat yang berwenang. Setelah disahkan, naskah keluar dikirim melalui sistem dan otomatis tercatat sebagai arsip aktif.

Selanjutnya setelah adanya naskah masuk dan naskah keluar, kemudian naskah tersebut di tindak lanjut melalui disposisi dan berkas. Disposisi adalah bagian penting dalam alur tindak lanjut naskah masuk. Disposisi berisi arahan,

instruksi, atau petunjuk dari pimpinan kepada pejabat terkait dalam menanggapi naskah yang diterima. Dalam aplikasi SRIKANDI, disposisi dilakukan secara elektronik, memungkinkan proses yang lebih cepat dan transparan serta tercatat sebagai bagian dari dokumentasi resmi. Terakhir, berkas merupakan kumpulan naskah yang dikelola dalam satu kesatuan karena memiliki keterkaitan isi atau topik. SRIKANDI menyediakan pengelolaan berkas yang sistematis berdasarkan kode klasifikasi arsip. Setiap berkas menjadi unit kerja arsip yang utuh, memudahkan pelacakan, penyimpanan, hingga proses penyusutan arsip sesuai dengan siklus kearsipan.

Pada dimensi *leadership* yang kedua yaitu pengambilan keputusan dimana penelitian ini melihat sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam setiap tindakan pengambilan keputusan yang terkait penerapan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk optimalisasi pelayanan publik. Berdasarkan hasil tinjauan peneliti dalam RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 ditemukan bahwa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng dalam bidang kearsipan salah satunya adalah masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah, sehingga dengan adanya penerapan SRIKANDI ini kemudian bisa mengatasi salah satu permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bantaeng. Perihal pengambilan keputusan adalah bagian dari kemauan politik pemerintah daerah melalui kepala daerah dalam menjalankan suatu program. Dalam artian, untuk mendukung penerapan SRIKANDI dibutuhkan keseriusan berupa kebijakan politik berupa dasar hukum terkait.

Pada dimensi *leadership* yang ketiga yaitu keteladanan dimana penelitian ini melihat sejauh mana strategi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tertinggi mulai dari kepala daerah sampai kepada kepala OPD sehingga mampu menjadi teladan dalam penerapan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dalam upaya optimalisasi pelayanan publik. Menurut temuan dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa terdapat instruksi dari kepala daerah terhitung tanggal 1 Januari 2024 tidak akan menerima persoalan administrasi selain melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.

Keteladanan dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis ini kemudian menjadi tantangan bagi semua unsur yang memiliki kepentingan dengan kepala daerah. Hal tersebut mengingatkan adanya instruksi berupa semua administrasi hanya melalui sistem tersebut. Keteladanan itu menjadi bukti kuat dalam kemauan politik dalam penerapan sistem ini. Dengan begitu, semua Organisasi Perangkat Daerah harus melaksanakan instruksi tersebut termasuk dalam administrasi pemerintahan di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Atas dasar instruksi tersebut kemudian semua Organisasi Perangkat daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis dituntut untuk beralih dari aktivitas administrasi perkantoran yang lama berubah menjadi menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

3.2. Trustworthy Government dalam Penerapan SRIKANDI untuk Optimalisasi Layanan Publik Dianalisis dari Elemen Participation dan Involvement

Pada dimensi yang pertama partisipasi dan keterlibatan yaitu kolaborasi atau kerja sama berbagai unsur terkait dimana penelitian ini melihat upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diambil dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk optimalisasi pelayanan publik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan yang hadir dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis ini adalah tenaga pendamping yang mampu menjelaskan kepada admin Organisasi Perangkat Daerah dalam penerapan sistem tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi yang terbangun antar pihak terkait dalam upaya optimalisasi pelayanan publik yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan.

Kolaborasi yang terbangun tersebut kemudian direalisasikan dalam kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah dengan unsur terkait. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Bantaeng dalam penerapan SRIKANDI ini telah melakukan upaya massif yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

Pada dimensi *participation and involvement* yang kedua adalah *feedback* dan evaluasi atau dampak dari penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Berdasarkan temuan di lapangan penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi terhadap realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam upaya optimalisasi pelayanan publik menuju pemerintahan yang terpercaya. Pertama, Pemerintah Kabupaten Bantaeng terus berupaya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mencatat adanya peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari tahun 2022 hingga 2024. Kenaikan Indeks SPBE tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang begitu massif dilakukan dalam upaya optimalisasi pelayanan publik. Kedua, adanya kenaikan Indeks Reformasi dan Birokrasi dan nilai pengawasan kearsipan dan tingkat digitalisasi arsip. Hal ini tidak lepas dari pengaruh penerapan SRIKANDI secara massif juga.

3.3. Trustworthy Government dalam Penerapan SRIKANDI untuk Optimalisasi Layanan Publik Dianalisis dari Elemen Effective Communication

Dalam teori *Trustworthy Government* (Carnevale, 1995), Komunikasi yang efektif berperan penting dalam membangun hubungan yang dilandasi oleh tingkat kepercayaan yang tinggi, sebab keterbukaan dalam berkomunikasi dan kepercayaan saling mendukung serta berjalan seiring, rasa percaya yang tinggi akan muncul. Dengan itu dirumuskan dua sub aspek meliputi komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal meliputi Berdasarkan diskusi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, terdapat komunikasi vertikal yang dilakukan dengan

Pemerintah Pusat dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia selaku penanggungjawab SRIKANDI Nasional.

Komunikasi ini dilakukan berupa kordinasi terkait optimalisasi penerapan SRIKANDI melalui Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengundang pihak ANRI untuk sosialisasi teknis penggunaan SRIKANDI ini. Komunikasi Horizontal meliputi Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantaeng dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, terdapat komunikasi horizontal yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah meliputi kordinasi antar Pemerintah Kabupaten lain terkait dengan penerapan SRIKANDI dan kordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Inovasi Teman SRIKANDI dengan tujuan optimalisasi pelayanan publik

3.4. Trustworthy Government dalam Penerapan SRIKANDI untuk Optimalisasi Layanan Publik Dianalisis dari Elemen Performance Appraisal and Incentive System

Dalam teori *Trustworthy Government* (Carnevale, 1995) Penilaian terhadap kinerja serta sistem pemberian insentif, berupa penghargaan maupun sanksi atas hasil kerja yang dicapai, dapat meningkatkan tingkat kepercayaan. Kualitas Kerja meliputi berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Bidang E-Government, penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Bantaeng memberikan pengaruh yang positif terhadap mutu kinerja pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi sistem tersebut dalam peningkatan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Temuan serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, yang mengungkapkan bahwa sistem ini turut berdampak pada hasil evaluasi pengawasan serta digitalisasi kearsipan di Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2024.

Dukungan Pimpinan meliputi Berdasarkan hasil diskusi dengan Pejabat Arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dukungan dari pimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Bentuk dukungan tersebut antara lain meliputi pengalokasian anggaran yang besar untuk sistem SRIKANDI dan penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan ujian kompetensi bagi arsiparis yang berimplikasi pada peningkatan insentif.

3.5. Trustworthy Government dalam Penerapan SRIKANDI untuk Optimalisasi Layanan Publik Dianalisis dari Elemen Managing Power, Politics, and Conflict

Dalam teori *Trustworthy Government* (Carnevale, 1995) Pengelolaan konflik, kekuasaan, dan politik merupakan tiga unsur yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi apa pun, termasuk lembaga pemerintahan. Dalam penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh politik, kekuasaan dan konflik menjadi suatu elemen penting dalam meningkatkan

kepercayaan terhadap penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) mampu memberikan dampak terhadap optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil diskusi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng terkait pengelolaan kekuasaan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masifnya implementasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sangat dipengaruhi oleh pengaturan pembagian kewenangan yang dijalankan melalui Tim Koordinasi Inovasi Teman SRIKANDI.

Politik meliputi Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantaeng, keberadaan kemauan politik (political will) dari kepala daerah, dalam hal ini Penjabat Bupati Bantaeng, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Bantaeng. Hal ini antara lain tercermin melalui kebijakan penganggaran yang berpihak pada isu kearsipan dengan membangun gedung depo arsip, sehingga sistem tersebut dapat diterapkan secara luas guna mendukung optimalisasi pelayanan publik.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kabupaten Bantaeng berkontribusi secara positif terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang terpercaya (*trustworthy government*). Melalui analisis lima elemen menurut Carnevale, yaitu *leadership, participation and involvement, effective communication, performance appraisal and incentive system, serta managing power, politics, and conflict*, penerapan SRIKANDI terbukti mampu meningkatkan efisiensi berupa penghematan anggaran alat tulis kantor, akuntabilitas dengan hasil valuasi LAKIP yang terus meningkat, dan transparansi dalam pelayanan publik yang dilihat dari indeks SPBE yang terus naik. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pimpinan daerah berupa keteladanan dalam administrasi dan keberpihakan penganggaran dalam kearsipan, sinergi antarperangkat daerah dengan dibentuknya tim koordinasi inovasi teman SRIKANDI, serta adanya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan arsip dengan pemanfaatan SRIKANDI. SRIKANDI memberikan kemudahan dalam pengelolaan surat-menyurat dan dokumen, sehingga mempercepat proses pelayanan dan memperkuat integritas birokrasi. Temuan ini sesuai dengan perubahan informasi yang cepat menuntut para profesional informasi untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Digitalisasi arsip menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang kini lebih memilih akses informasi secara daring dibandingkan dengan pencarian dokumen fisik. Meskipun proses digitalisasi memerlukan waktu dan anggaran yang signifikan, investasi ini akan memberikan citra positif bagi organisasi di masa depan.

Perkembangan teknologi telah memungkinkan akses dan eksplorasi arsip secara lebih luas, terdapat hambatan signifikan terkait hak cipta, privasi, dan isu teknis yang membatasi aksesibilitas materi arsip digital. Institusi memori dihadapkan pada kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan baru dalam

menangani kompleksitas ini, termasuk kolaborasi lintas disiplin antara ilmuwan digital, ilmuwan komputer, dan pembuat kebijakan. Upaya seperti jaringan AURA (Archives in the UK/Republic of Ireland & AI) menunjukkan pentingnya kerja sama untuk membuka akses terhadap aset budaya yang tersimpan dalam arsip digital. Hal ini sejalan dengan penelitian yang penulis temukan dimana terdapat kolaborasi melalui tim Inovasi Teman SRIKANDI (Dobrev, 2022).

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa kendala yang ditemukan oleh pengguna sistem ini diantaranya perlunya pengadaan sarana prasarana table, dukungan jaringan yang merata keseluruh daerah, serta terhubungnya notifikasi untuk surat masuk yang terhubung ke sosial media seperti whatsapp dan lain sebagainya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kabupaten Bantaeng berkontribusi secara positif terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang terpercaya (*trustworthy government*). Melalui analisis lima elemen menurut Carnevale, yaitu *leadership, participation and involvement, effective communication, performance appraisal and incentive system, serta managing power, politics, and conflict*, penerapan SRIKANDI terbukti mampu meningkatkan efisiensi berupa penghematan anggaran alat tulis kantor, akuntabilitas dengan hasil valuasi LAKIP yang terus meningkat, dan transparansi dalam pelayanan publik yang dilihat dari indeks SPBE yang terus naik. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pimpinan daerah berupa keteladanan dalam administrasi dan keberpihakan penganggaran dalam kearsipan, sinergi antarperangkat daerah dengan dibentuknya tim koordinasi inovasi teman SRIKANDI, serta adanya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan arsip dengan pemanfaatan SRIKANDI. SRIKANDI memberikan kemudahan dalam pengelolaan surat-menyurat dan dokumen, sehingga mempercepat proses pelayanan dan memperkuat integritas birokrasi. Namun demikian, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal keterbatasan infrastruktur digital dan kompetensi SDM yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi teknologi, serta komitmen lintas sektor untuk mendukung optimalisasi sistem ini secara menyeluruh. Secara keseluruhan, implementasi SRIKANDI menjadi langkah strategis dalam reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan terpercaya di Kabupaten Bantaeng.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini hanya mendalami penerapan pada 3 perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Donas Perpustakaan dan Dinas Kominfo

Kabupaten Bantaeng sehingga belum dikatakan secara menyeluruh kepada semua perangkat daerah di Kabupaten Bantaeng

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi untuk Optimalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Bantaeng.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantaeng, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bantaeng beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. N. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 84–88. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/900>
- Carnevale, D. G. (1995). *Trustworthy Government Leadership and Management Strategies for Building Trust and High Performance*. Jossey Bass.
- Dewi Marta, F. (2017). Implementation of e-Government towards Trustworthy Government Fitriyul Dewi Marta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, IX(2), 82–96.
- Dimas Saputra, H. S. (2024). Advantages and disadvantages of technological implementation in archive systems. *Record and Library Journal*, Vol. 10 No. 2 (2024), 388–412. <https://doi.org/10.20473/rlj.V10-I2.2024.388-412>
- Dobrev, M. (2022). Introduction: Challenges and Prospects of Born-Digital and Digitized Archives. *Archival Science*, 1-10. <https://doi.org/10.1007/s10502-022-09369-1>
- Huberman, M. &. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Kalesaran, M. (2021). Penerapan Sistem Merit Menuju Pemerintahan yang

Terpercaya (Trustworthy Government) (Studi Penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, VI(01), 1–23.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, 6 (2015).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2018).

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. (2021). *Arsip Nasional Republik Indonesia*, 7(2), 107–115.

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pub. L. No. 12.

Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1-55.

Polii, A. M. (2021). Membangun Kredibilitas Pemerintah Melalui Digitalisasi Pemerintahan Di Era Post-Truth (Studi Pengembangan Command Center Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 81–91. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1713>

Sirajuddin, S. M., & Atrianingsi, A. . (2020). Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap E-Government: Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 80. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.80-88.2020>.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.

Sukoco. (2023). *Memulihkan Kepercayaan Publik*. Jakarta: Kompas.Id Publik.

Syaha & Riau. (2011). *Buku Metodologi Penelitian (Issue September)*.

Tulungen. (2022). Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA*, 10 No.2 Ap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 1 (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 19 19 (2009).

Umi Nadia Jalaludin, N. E. (2025). Digital Preservation in Digital Libraries: A Systematic Literature Review. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 9 No. 1, hlm. 4186–4199. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.9010326>

Wasistiono, S. (2022). *Kepemimpinan Pemerintahan dan Kepamongprajaan*. Sketsa Media.

